



**PERSPEKTIF HAK IMUNITAS KURATOR SAAT
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

TESIS

IRFAN EKA SAPUTRA

1510922004

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2017**



**PERSPEKTIF HAK IMUNITAS KURATOR SAAT
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

IRFAN EKA SAPUTRA

1510922004

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Irfan Eka Saputra
NRP : 1510922004
Tanggal : 20 November 2017

Jakarta, 20 November 2017

Yang Menyatakan,



Irfan Eka Saputra

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

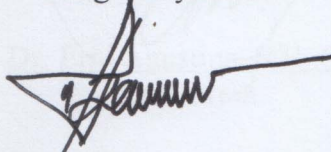
Nama : Irfan Eka Saputra
NRP : 1510922004
Program : Pascasarjana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERSPEKTIF HAK IMUNITAS KURATOR SAAT PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 20 November 2017
Yang menyatakan



Irfan Eka Saputra

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Irfan Eka Saputra

NRP : 1510922004

Program Studi : Magister Hukum

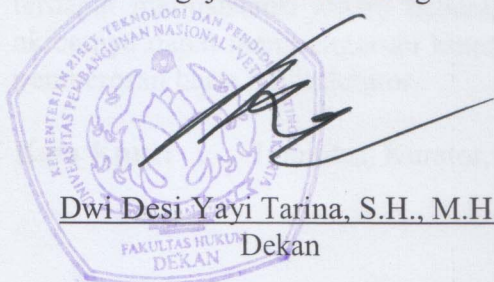
Judul Tesis : PERSPEKTIF HAK IMUNITAS KURATOR SAAT
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU
Ketua Penguji

Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Penguji I / Pembimbing

Dr. Hj. Laily Washliati, SH, Mhum.
Penguji II/ Pembimbing



Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.
Dekan

Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 November 2017

PERSPEKTIF HAK IMUNITAS KURATOR SAAT PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT IRFAN EKA SAPUTRA

ABSTRAK

Berdasarkan pada Pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU terhitung sejak tanggal putusan Pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tujuan utama kepailitan adalah pembagian harta debitur pailit oleh kurator kepada semua kreditornya. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sistem terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sistem bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing. Dalam instrument kepailitan terdapat pihak-pihak dari yang berperan dalam pengurusan harta pailit yaitu Hakim Pengawas dan Kurator yang dimana dinyatakan pada Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa dalam penetapan pernyataan pailit harus diangkat: 1. Kurator 2. Hakim pengawas yang diangkat oleh Hakim pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis hak imunitas kurator saat pengurusan dan pemberesan harta pailit dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Hak imunitas kurator saat pengurusan dan pemberesan harta pailit lahir secara otomatis karena kedudukannya sebagai perwakilan pengadilan yang menjalan kekuasaan kehakiman selama bertindak dalam statutory obligations. Kurator dalam melakukan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit harus independent sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kurator harus dapat memposisikan dirinya dengan baik terhadap debitur, kreditur dan Hakim Pengawas, agar dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. 2. Perlindungan hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum menjamin perlindungan hukum bagi kurator. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang kepailitan terdapat inkonsistensi antara beberapa pasal diantaranya Pasal 9 dan Pasal 16, akibatnya dapat mempengaruhi kinerja kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur.

Kata Kunci : Imunitas, Kurator, Pailit

CURATOR IMMUNITY RIGHTS PERSPECTIVE WHEN ARRANGEMENT AND ORDERS OF BANKRUPT TREASURES

IRFAN EKA SAPUTRA

ABSTRACT

Based on Article 16 of the Bankruptcy and PKPU Law as of the date of the Bankruptcy verdict set, the curator shall be authorized to perform the task of handling and ordering of bankrupt property. The main purpose of bankruptcy is the division of bankrupt debtors' property by the curator to all the creditors. Bankruptcy is intended to avoid the occurrence of separate systems or separate executions by creditors and replace them with a joint system, so that the debtor's wealth can be distributed to all creditors in accordance with their respective rights. In the bankruptcy instrument there are parties from those who play a role in the management of bankruptcy assets of the Supervisory Judge and the Curator which is stated in Article 15 paragraph (1) of the Bankruptcy and PKPU Law that in the declaration of bankruptcy statements should be lifted: 1. Curator 2. Judge supervisor who was appointed by a court judge. The purpose of this study is 1. To analyze the rights of curatorial immunity when handling and ordering of bankrupt property and 2. To know and analyze the law against the curator in carrying out its duties and authorities. With the normative juridical research method it is known that 1. The right of curatorial immunity when handling and ordering of bankruptcy property is born automatically because of its position as a court representative who runs the judicial power during acting in statutory obligations. The curator in performing the duties and handling of the bankruptcy property must be independent so as not to harm either party. The curator must be able to position himself well against the debtor, creditor and Supervisory Judge, in order to perform his duties with the maximum. 2. Legal protection of the Curator in performing its duties and authorities in Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, has not guaranteed legal protection for the curator. This happens because in bankruptcy law there are inconsistencies between several articles such as Article 9 and Article 16, consequently can affect the performance of curators in managing and securing debtor bankruptcy property.

Keywords : Immunity, Receiver, Bankruptcy

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“PERSPEKTIF HAK IMUNITAS KURATOR SAAT PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT”

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada orang tua penulis Ayahanda penulis alm. Kopol Tri Taufan Cahyo dan Ibunda Astuti Basiru yang senantiasa penulis sayangi dan hormati. Melalui pengorbanan, kerja keras dan kasih sayang sehingga penulis bisa seperti ini. Restu dan amanah kalian selalu menjadi motivasi yang ampuh bagi penulis untuk lebih baik lagi kedepannya.
2. Adik-adik penulis Fanny Dwi Ameliza dan Landy Tri Asto yang selalu memotivasi dan memberikan doa serta dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini.
3. Yth Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
4. Yth. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
5. Yth. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Yth. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU selaku PembimbingI.

7. Yth. DR. Arrisman, SH., MH selaku Pembimbing II.
8. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
9. Seluruh saudara-saudara Penulis, baik keluarga besar dari alm. Zonce Usman Basiru dan keluarga besar alm. Soemarno yang selalu memberikan dukungan baik doa dan support, terhadap pembuatan Tesis hukum ini.
10. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – temaan di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
11. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Sahabat-sahabatku yang belum bisa saya sebutkan, siapapun dan dimanapun kau berada, doa kalian adalah kekuatan terbesar. Biarlah doa kalian juga ikut menghiasi Tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 2017

Irfan Eka Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penelitian	5
I.4. Manfaat Penelitian	5
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
I.5.1. Kerangka Teoritis	6
I.5.2. Kerangka Konsep.....	15
I.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	25
II.1. Kepailitan	25
II.1.1. Pengertian dan Syarat-Syarat Kepailitan.....	25
II.1.2. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	30
II.1.3. Pengurusan Harta Pailit	35
II.1.4. Pemberesan Harta Pailit	41
II.1.5. Kedudukan Hukum Debitor Setelah Berakhirnya Pemberesan Harta Pailit	46
II.2. Kurator.....	49
II.2.1. Syarat dan Pengangkatan Kurator	49
II.2.2. Tugas dan Kewenangan Kurator	57
II.2.3. Imbalan Jasa Kurator	61
II.2.4. Proses dan Tata Cara Pengangkatan Seorang Kurator	63
BAB III. METODE PENELITIAN	68
III.1. Tipe Penelitian	68
III.2. Sifat Penelitian	69
III.3. Sumber Data.....	70
III.4. Metode Pengumpul Data.....	71
III.5. Metode Analisis data.....	71
BAB IV. PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT	73
IV.1. Hak Imunitas Kurator Saat Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit ...	73
IV.1.1. Pengurusan Harta Pailit.....	73
IV.1.2. Pencocokan Utang Piutang	77
IV.1.3. Perdamaian.....	82
IV.1.4. Pemberesan.	83

IV.1.5. Hak Imunitas Kurator Saat Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	
IV.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya.....	86
IV.2.1. Tanggungjawab dan Kewenangan Kurator.....	86
IV.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya.....	90
BAB V. PENUTUP	101
V.1. Kesimpulan	101
V.2. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP